

PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Cahaya Warman

*FKIP Universitas Mulawarman
Jl. Muara Pahu Gn. Kelua Samarinda.
e-mail: cahaya.warman@gmail.com*

Abstract : *This paper explain: (1) Background of civic education in Indonesia (2) Problems in implementing civic education in Indonesia (3) How the character of civic education in Economic Asean Society (MEA) is. Civic education in Indonesia as the background by along history of Indonesian since colonialism era until filling independence era that can make different ruled based on each era. Many problems in implementing civic education in Indonesia is : (a) study more give high knowledge but less application, (b) some teacher not able to manage classroom efectivety, (c) between material of civic education and time allocation is not balance, (d) civic education in Indonesia can make negative effect for students perceptions, (e) some teacher teach still use the conventional model, (f) activities teachers more dominant than students. The role of civic education in the face of Economic Asean Society (EAS) : (a) increasing awareness and sense of nationalism to local products, (b) propose an appropriate legal products to create a fovorable regulatory Indonesia for example, every citizen of a foregin working in Indonesia should be able to speak Indonesian, invested capital should be in rupiah. (c) mainting an attitude independent and active foreign policy and not fixated on intra-Asean trade, (d) promote and introduce the Pancasila economic system is Indonesian economic condition in order to stay awake.*

Keywords: *Civic education, Economic Asean Society*

Abstrak. Makalah ini menjelaskan: (1) Latar belakang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, (2) Permasalahan dalam menerapkan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia (3) Bagaimana karakter pendidikan kewarganegaraan dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia berlatar belakang sejarah Indonesia yang panjang sejak era penjajahan hingga era kemerdekaan yang mana tiap-tiap era memiliki peraturan yang berbeda. Berbagai masalah dalam menerapkan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia diantaranya adalah: (a) pelajaran lebih banyak memberi pengetahuan namun kurang aplikasinya, (b) beberapa guru tidak dapat mengelola kelas secara efektif, (c) tidak seimbang antara banyaknya materi ajar pendidikan kewarganegaraan dan alokasi waktu, d) Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi persepsi siswa, (e) beberapa guru masih mengajar menggunakan model konvensional, (f) kegiatan guru lebih dominan daripada siswa. Peran pendidikan kewarganegaraan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA): (a) meningkatkan kesadaran dan rasa nasionalisme terhadap produk lokal, (b) mengajukan produk hukum yang sesuai untuk menciptakan peraturan yang mengatur Indonesia misalnya, sebagai contoh, setiap warga negara asing yang bekerja di Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia, modal yang diinvestasikan harus dalam rupiah. (c) mempertahankan kebijakan politik luar negeri yang independen dan aktif dan tidak terpaku pada perdagangan intra-ASEAN, (d) mempromosikan dan mengenalkan bahwa sistem ekonomi Pancasila adalah kondisi ekonomi Indonesia agar tetap mawas diri.

Kata kunci: *Pendidikan kewarganegaraan, Masyarakat Ekonomi Asean.*

PENDAHULUAN

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dapat membuka akses pasar yang lebih luas

dan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran, serta untuk memperkuat daya saing kawasan dalam

menghadapi kompetisi global dan regional. Disisi lain, berlakunya MEA juga membuka peluang sekaligus tantangan yang berat dalam ketenagakerjaan dan kehidupan ekonomi, sehingga salah satu faktor penting dalam menghadapi MEA adalah mempersiapkan tenaga kerja terampil yang memiliki kemampuan yang dapat disetarakan dengan kemampuan tenaga kerja dari negara lain. MEA adalah tujuan akhir integrasi ekonomi seperti yang dicanangkan dalam ASEAN Vision 2020 adalah: *"To create a stable, prosperous and highly competitive ASEAN economic goods, services, investment, skill labor economic development and reduced poverty and socio-economic disparities in year 2020"* (Rofiq, 2015:252).

Pendidikan sebagai wahana meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dalam pembangunan bangsa. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke empat menyatakan "mencerdaskan kehidupan bangsa", pernyataan tersebut menunjukkan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan, dimana pernyataan tersebut didukung presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya pada hari pendidikan nasional 2 Mei 2013 menyatakan "pendidikan adalah bekal kemajuan bangsa.

Isu MEA jika dikaitkan dengan PKn, menggambarkan bahwa tantangan persaingan ekonomi berpengaruh terhadap sistem pendidikan khususnya PKn. Oleh karena itu, sistem PKn harus mengantisipasi perubahan zaman, dan siap menghadapi MEA dengan langkah-langkah strategis untuk mengaktualisasikan identitas bangsa yang relevan di segala zaman.

Sebagai agen perubahan sosial, PKn di era globalisasi dewasa ini dituntut untuk mampu memainkan perannya secara dinamis dan proaktif. Keberadaan PKn diharapkan mampu membawa perubahan dan kontribusi yang berarti bagi

bangsa, baik pada tataran intelektual teoritis maupun praktis. Selain itu, keberadaan PKn diharapkan bukan saja sebagai proses penanaman nilai moral untuk membentengi diri dari eksek negatif globalisasi, tetapi yang paling penting adalah bagaimana nilai-nilai moral yang telah ditanamkan PKn tersebut mampu berperan sebagai kekuatan pembebas dari himpitan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan sosial budaya dan ekonomi. Dari uraian tersebut di atas, maka tulisan ini akan membahas tentang bagaimana peran PKn dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean.

PEMBAHASAN

Dunia pendidikan saat ini masih dihadapkan pada berbagai persoalan, mulai dari soal rumusan tujuan pendidikan yang kurang sejalan dengan tuntutan masyarakat, sampai kepada persoalan guru, metode, kurikulum dan lain sebagainya. Selain itu juga berbagai isu, antara lain pendidikan diharapkan membawa masyarakat pada *civil society* (Nursalim, 2016). Makalah ini akan membahas secara konseptual tentang apa yang melatar belakangi pendidikan kewarganegaraan (PKn) di Indonesia, permasalahan apa saja dalam implementasi PKn di Indonesia, dan bagaimana peran PKn dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA).

Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia

Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan, kemudian dilanjutkan dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan sampai dengan era pengisian kemerdekaan, menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti No.267/Dikti/2000, (Takwin, 2011:1) tujuan

Pendidikan Kewarganegaraan adalah: (1) tujuan umum memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara agar dapat menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. (2) Tujuan khusus: (a) agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara Republik Indonesia yang terdidik dan bertanggungjawab, (b) agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggungjawab yang berlandaskan Pancasila, wawasan nusantara dan ketahanan nasional, (3) agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

Perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia mengalami perubahan yang sangat besar terutama berkaitan dengan gerakan reformasi, serta perubahan Undang-undang termasuk amandemen UUD 1945 serta Tap MPR NO.XVIII/MPR/1998, yang menetapkan mengembalikan kedudukan Pancasila pada kedudukan semula, sebagai dasar filsafat Negara. Hal ini menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam, akibatnya akhir-akhir ini bangsa Indonesia menghadapi krisis ideologi. Dewasa ini banyak kalangan elit politik serta sebagian masyarakat beranggapan bahwa Pancasila merupakan label politik Orde Baru sehingga mengembangkan serta mengkaji Pancasila dianggap akan mengembalikan kewibawaan Orde Baru. Pandangan yang sinis serta upaya melemahkan peranan ideologi Pancasila pada era Reformasi dewasa ini akan berakibat fatal bagi bangsa Indonesia yaitu melemahnya kepercayaan rakyat terhadap ideologi negara yang kemudian pada

gilirannya akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang telah lama dibina, dipelihara serta didambakan bangsa Indonesia sejak dahulu. Oleh karena itu, agar kalangan intelektual terutama mahasiswa memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945, maka diperlukan pendidikan kewarganegaraan di berbagai tingkatan pendidikan.

Permasalahan Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam pasal 37 ayat (1) dan (2), UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan di Indonesia di semua jenjang pendidikan dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi. Namun, faktanya tidak semua sekolah mampu memberikan kesan tentang makna pendidikan termasuk pendidikan kewarganegaraan. Saat ini sekolah belum menjadi sarana pendidikan yang menyenangkan dan memberikan pengetahuan yang bermakna bagi peserta didik, tetapi sekolah lebih banyak membebani siswa dengan pengetahuan yang banyak, tetapi kurang bermakna (Takwin, 2011:1). Pernyataan ini terkait dengan pemahaman siswa terhadap materi ajar, termasuk PKn, dimana siswa mampu menyajikan tingkat hapalan yang baik terhadap materi yang diterima, tetapi sulit untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Suryadi dan Somardi (2000) dalam Takwin, M. (2011) berpandangan bahwa sistem kehidupan bernegara (sebagai bidang kajian PKn) merupakan struktur dasar bagi pengembangan pendidikan kewarganegaraan. Moh. Mujib Zunun (Takwin, M. 2011) mengatakan seorang siswa sebelum menerima pembelajaran telah

mempunyai konsep awal tentang berbagai fenomena di sekitarnya dan jika konsep baru yang diterima disekolah tersebut ada kaitannya dengan konsep awal siswa, maka pembelajaran tersebut akan mudah untuk diterima, sebaliknya jika bertentangan antara konsep awal dan konsep baru, maka siswa akan kesulitan untuk menerimanya bahkan cenderung untuk menolak seperti pura-pura tidak mendengar, cuek atau keluar kelas.

Persoalannya adalah bagaimana menemukan pendekatan yang terbaik untuk menyampaikan berbagai konsep PKn agar siswa dapat menggunakan dan mengingat lebih lama konsep tersebut. Apakah guru PKn telah dapat berkomunikasi secara efektif dengan siswa yang selalu bertanya tentang alasan dari sesuatu. Bagaimana membuka wawasan berfikir dan beragam dari seluruh siswa agar konsep yang dipelajarinya dapat dikaitkan dengan kehidupan nyata. Inilah tantangan kita bagi guru, khususnya guru PKn, yang pada ulasan berikut akan penulis coba paparkan Problematika dan Tantangan Guru PKn di Sekolah.

Problematika Guru Dalam Implementasi PKn

Guru Pkn adalah dua kata yang jika diterjemahkan secara bebas adalah guru dan PKn. Guru, dalam pengertian sederhana adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di suarau/mushalla, di rumah dan sebagainya. Syaful Bahri Djamarah (Takwin, 2011:2). Sedang kata PKn adalah merujuk pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang wajib diajarkan di sekolah-sekolah (kurikulum 2006/KTSP), dengan materi pokok menyangkut hubungan antara warganegara dan Negara serta pendidikan pendahuluan bela Negara. Oleh

UU No.20 Tahun 2003 pada penjelasan pasal 37 ayat (1) dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Guru Pkn adalah orang yang berfungsi melaksanakan dan memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik mengenai hubungan antara warga Negara dan Negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar anak didik tersebut nantinya menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Beberapa problematika yang dihadapi Guru dalam implementasi PKn, antara lain:

Problem Dalam Pengelolaan Kelas

Pengelolaan kelas merupakan masalah yang kompleks, dimana guru PKn dituntut untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas untuk mencapai tujuan pengajaran secara efisien dan efektif, yang memungkinkan anak didik dapat belajar dengan baik. Pengelolaan kelas adalah keterampilan seorang guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Namun faktanya, masih ada beberapa guru PKn yang masih belum mampu mengelola kelas secara efektif. Hal ini disebabkan antara lain oleh factor guru itu sendiri, dan factor kebijakan rekrutmant. Oleh karena itu perlu ada prioritas program pembinaan guru melalui pendidikan dan pelatihan, dan perlu evaluasi kebijakan terkait dengan proses rekrutman pegawai dengan menerapkan prinsip *the right man on the right place* (penerimaan pegawai sesuai keahlian).

Perbandingan Materi dengan Alokasi Waktu Pembelajaran

Keluasan materi PKn yang tidak seimbang dengan alokasi waktu yang tersedia pada jam pelajaran efektif di sekolah-sekolah, yakni sekitar 2 JP minggu (Catatan 1 JP = 35 menit: SD/MI. 40 menit:SMP/MTs, 45 menit :SMA/MA) akan berdampak pada mutu hasil belajar. Materi PKn sangat luas dan mencakup hubungan warga Negara dengan Negara dan

pendidikan pendahuluan bela Negara yang dari masa ke masa ruang lingkup materinya mengalami perubahan sejalan dengan dinamika dan kepentingan politik. Dalam kurikulum 1957, isi pelajaran Kewarganegaraan membahas cara-cara memperoleh kewarganegaraan dan cara-cara kehilangan kewarganegaraan Indonesia; sedangkan isi materi mata pelajaran Civics pada tahun 1961 adalah sejarah kebangkitan nasional, UUD, pidato politik kenegaraan, yang terutama diarahkan untuk "*nations and character building*" bangsa Indonesia. Dalam kurikulum 1968, muatan bahan PKN (*Civic Education*) sangat luas, karena bukan hanya membahas *Civics* dan UUD 1945, tetapi meliputi pula muatan sejarah kebangsaan Indonesia dan bahkan di Sekolah Dasar mencakup ilmu bumi.

Selanjutnya, dalam standar kompetensi kurikulum PKn 2004 dan KTSP 2006 diuraikan bahwa ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ditekankan pada bidang kajian Sistem Berbangsa dan Bernegara dengan aspek-aspeknya sebagai berikut: (1) Persatuan bangsa; (2) Nilai dan norma (agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum); Hak asasi manusia; (3) Kebutuhan hidup warga negara; (4) Kekuasaan dan politik; (5) Masyarakat demokratis; (6) Pancasila dan konstitusi negara; dan (8) Globalisasi.

Dilihat dari struktur keilmuannya, Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru mencakup tiga dimensi keilmuan, yaitu dimensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan karakter atau watak kewarganegaraan (*civic dispositions*).

Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi terhadap kurikulum yang sedang berjalan guna mengatasi ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Selain itu, guru PKn juga harus berperilaku kreatif dan inovatif memiliki wawasan luas dan mampu mengikuti

perkembangan pengetahuan regional dan global yang bisa diperoleh melalui beragam bahan bacaan dan penguasaan teknologi informasi seperti mengakses di internet.

Keberadaan PKn dalam Penentuan Kelulusan

Tidak dimasukkannya PKn pada mata pelajaran yang di UN (ujian nasional) kan dalam penentuan kelulusan siswa dalam satuan pendidikan dasar dan menengah berdampak pada persepsi negatif bagi siswa, orang tua siswa, dan sebagian guru. Mereka menilai bahwa mata pelajaran PKn kurang penting jika dibandingkan dengan mata pelajaran yang di UN kan. Hal ini dapat dilihat dari adanya kecenderungan untuk mengabaikan mata pelajaran PKn, baik oleh siswa, orang tua siswa, maupun pihak sekolah. Para siswa cenderung lebih banyak mengalokasikan waktu untuk belajar mata pelajaran yang di UN kan. Begitu juga orang tua siswa, sulit ditemui orang tua siswa yang memberikan biaya untuk belajar tambahan pada mata pelajaran PKn, tetapi yang pasti untuk belajar tambahan pada mata pelajaran yang di UN kan. Begitu juga pihak sekolah, ketika menjelang UN, mata pelajaran PKn kadang-kadang diabaikan demi kegiatan pemadatan untuk materi pelajaran yang akan di UN kan. Demikian juga halnya pada saat pelaksanaan Ujian Nasional, proses untuk mencapai standar kompetensi lulusan kadang-kadang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan tujuan PKn dan bahkan bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Jika kondisi tersebut tidak segera dievaluasi dan ditindak lanjuti, maka akan terjadi pembentukan karakter anak bangsa yang tidak sesuai dengan tujuan PKn dan tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, cerdas, terampil dan bertanggung jawab.

Minimnya Kreativitas Guru Dalam Pembelajaran

Problem keempat dari guru adalah kurang kreatifnya guru PKn dalam membuat alat peraga, media dan penggunaan metode pembelajaran. Selama ini masih ada guru PKn yang menggunakan metode ceramah saja dalam pembelajarannya. Akibatnya, proses belajar mengajar (PBM) terkesan sangat kaku, kurang fleksibel, kurang demokratis, dan guru cenderung lebih dominan dalam proses belajar mengajar. Guru PKn mengajar lebih banyak mengejar target yang berorientasi pada nilai ujian akhir, masih menggunakan model konvensional yang monoton, aktivitas guru lebih dominan daripada siswa, akibatnya guru seringkali mengabaikan proses pembinaan tatanan nilai, sikap, dan tindakan; sehingga mata pelajaran PKn tidak dianggap sebagai mata pelajaran pembinaan warga negara yang menekankan pada kesadaran akan hak dan kewajiban tetapi lebih cenderung menjadi mata pelajaran yang jenuh dan membosankan, Takwin, 2011:4). Oleh karena itu, guru dapat memanfaatkan sumber belajar lainnya yang tidak hanya berada di dalam kelas. Guru Pkn harus selalu meningkatkan kompetensi pedagogik; (b) tidak enggan memanfaatkan TIK; (c) guru PKn harus menyukai dan melakukan penelitian tindakan kelas (PTK); (d) fasilitas pendukung, seperti alat peraga, peralatan praktikum PKn perlu dilengkapi.

Peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam Menghadapi MEA

Pertemuan negara-negara ASEAN di Kuala Lumpur Malaysia pada Agustus 2006 sepakat mengembangkan masyarakat ekonomi ASEAN. Pertemuan tersebut menghasilkan deklarasi masyarakat ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) yang di tandai pada 20 November 2007 memuat isi deklarasi tersebut salah satunya adalah ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas

(ditjenkpi.kemendag.go.id). Pada tahun 2015 negara-negara yang tergabung dalam ASEAN (*Association of South East Asian Nation*) mengimplementasikan kerjasama masyarakat ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*). Salah satu poin deklarasi tersebut adalah penyediaan tenaga terdidik. Persaingan tenaga kerja di dalam MEA akan sangat ketat. Bagaimanapun di dalam dunia pasar bebas MEA, Indonesia akan di banjiri oleh tenaga kerja dan pelaku usaha dari Negara asing di kawasan ASEAN. Apa lagi ukuran SDM masyarakat Indonesia berada rata-rata di bawah SDM masyarakat warga negara asing kawasan ASEAN. Tanpa SDM yang trampil, mumpuni dan profesional yang di miliki oleh masyarakat Indonesia, maka dapat di pastikan Negara Indonesia hanya akan menciptakan para tenaga kerja kasar, seperti buruh, dan pembantu rumah tangga. Hal serupa juga akan di alami para pelaku usaha anak bangsa yang akan menjadi penonton dalam MEA. Untuk menciptakan tenaga kerja yang trampil, memiliki kopetensi yang tinggi, mumpuni dan profesional, maka dunia pendidikan juga mempunyai tanggungjawab dalam membenahi tingkat SDM bangsa Indonesia agar dapat bersaing dengan para tenaga kerja dari negara-negara ASEAN.

Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat yang berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru, bahwa demokrasi itu merupakan bentuk kehidupan dalam masyarakat yang paling menjamin hak-hak dari warga masyarakat". Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pembentukan warga negara yang dapat memahami dan bisa melaksanakan hak-hak serta kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang di amanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas,

2006:49). Pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat mempersiapkan pesertadidik menjadi warga negara yang mempunyai komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara kebangsaan merupakan negara yang pembentukannya didasarkan pada pembentukan semangat kebangsaan dan nasionalisme yakni tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama, walaupun warga masyarakat itu berbeda-beda dalam agama, ras, etnik, atau golongannya. Pendidikan kewarganegaraan sebagai benteng moral warganegara berfungsi mencegah persebaran dampak buruk MEA. Dalam dunia internasional Masyarakat warga memiliki peran kelompok yang memimpin membangun kepentingan dan nilai umum dan luas untuk menarik dukungan kelompok lain. Artinya apabila kelompok ini berhasil mempengaruhi masyarakat untuk mempertahankan kedaulatan dalam menggunakan produk lokal maka MEA tidak akan terlalu berbahaya bagi masyarakat kecil dan menengah.

Peran pendidikan kewarganegaraan dalam menghadapi MEA: *pertama* meningkatkan kesadaran dan rasa nasionalisme terhadap produk lokal. Kesadaran ini dapat dilakukan melalui institusi pendidikan formal seperti sekolah dan perkantoran, atau melalui sosialisai tidak langsung seperti iklan dan jargon sehari-hari. *Kedua* mengusulkan produk hukum yang tepat untuk membuat sebuah regulasi yang menguntungkan Indonesia misalnya setiap warganegara asing yang akan bekerja di Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia, modal yang di tanam harus menggunakan mata uang rupiah. *Ketiga* mempertahankan sikap politik luar negeri bebas aktif, sikap politik yang telah dianut bangsa Indonesia sejak merdeka hendaknya tetap di pertahankan dan tidak terpaku pada perdagangan intra-Asean

saja. *Keempat* menggalakkan dan mengenalkan system ekonomi pancasila agar kondisi ekonomi Indonesia tetap terjaga, yaitu prinsip ekonomi yang berdasarkan pada UUD 1945 pasal 33, yaitu:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Kesimpulan

Peran PKn dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) diantaranya adalah meningkatkan kesadaran dan rasa nasionalisme terhadap produk local, mengusulkan produk hukum yang tepat untuk membuat sebuah regulasi yang menguntungkan Indonesia, mempertahankan sikap politik luar negeri bebas aktif yang telah dianut bangsa Indonesia sejak merdeka, menggalakkan dan mengenalkan system ekonomi pancasila agar kondisi ekonomi Indonesia tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas. (2006). *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003*. Jakarta: Depdiknas.
- Kemendikbud. (2013). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 65*

Tahun 2013 Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Kemendikbud.

- Siamanjuntak, Desmon. (2013). Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Kurikulum 2013. *Jurnal Pendidikan Penabur*, 21: 78-81.
- Takwin, M. (2011). *Problem dan Tantangan Pembelajaran PKn di Sekolah.* <http://tanjungpelayar.blogspot.co.id/2011/04/problem-dan-tantangan-pembelajaran-pkn.html>. diakses 20 September 2016.
- Rofiq, A. A. (2014). Menakar Pengaruh Masyarakat Ekonomi Asean 2015 Terhadap Pembangunan Indonesia. *Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Syar'I*, 1(2): 249-256.
- Nursalim, E. (2016). Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani di Era Globalisasi (Suatu Ikhtiar Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi Asean/MEA). *At-turats; Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam*, 10(1): 43-51.